

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 2 Desember 2014

Subyek : Pembalakan Liar

Hal : 22

PENEGAKAN HUKUM : KOMITMEN LEMAH TINDAK PEMBALAK LIAR

Komitmen pengelola hutan atau pemerintah dan aparat penegak hukum sangat lemah untuk menindak pelaku pembalakan liar. Penanganan hukum hanya menyeret pekerja pembalakan, belum menyentuh pelaku utama.

”Padahal, sangat bisa ditelusuri siapa pelaku utama,” ujar Bambang Irawan, pakar kehutanan dari Universitas Jambi, Senin (1/12). Pernyataan ini terkait maraknya pembalakan liar di dalam kawasan restorasi Hutan Harapan di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan.

Penelusuran Kompas pekan lalu, kayu dari Hutan Harapan dialirkan lewat Sungai Kapas dan Meranti serta anak-anak sungai. Kayu rakitan diangkut pembalok ke sejumlah pengolahan kayu chip di Kecamatan Batanghari Leko, Musi Banyuasin.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Bestari mengaku belum mengetahui maraknya pembalakan liar sehingga tahun ini belum pernah dilakukan operasi penanggulangan pembalakan liar di dalam kawasan itu. ”Belum ada laporan dari REKI (PT Restorasi Ekosistem) selaku pengelola hutan,” ujarnya.

Dia mengakui, pihaknya mengetahui pengelolaan Hutan Harapan tertekan oleh perambahan liar. Praktik itu bahkan melibatkan komunitas adat suku Bathin IX sebagai penghuni asli di wilayah hutan itu.

Saat tim operasi gabungan dari dinas kehutanan dan kepolisian menggelar operasi ke hutan, beberapa waktu lalu, timnya malah ditembaki dengan senapan rakitan oleh sejumlah warga Bathin IX.

Sementara itu, Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan telah menerima sejumlah surat aduan dari PT REKI terkait perambahan dan pembalakan liar di Hutan Harapan. (ITA/IRE).